



Sulawesi Utara

KAJIAN KEPENDUDUKAN PADA KONDISI TRANSISI DEMOGRASI LANJUT (BONUS DEMOGRAFI MENUTUP)

Jawa Timur

**OLEH :
RAHMADEWI
DAROJAD N. AGUNG NUGROHO
ROBANI CATURSAPTANI**

Bali

**PUSLITBANG KEPENDUDUKAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan kemurahan dan keberkahan-Nya sehingga penelitian yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu topic penelitian di Puslitbang Kependudukan tentang Kajian Kependudukan pada kondisi transisi demografi lanjut (Bonus Demografi menutup) di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Utara.

Secara nasional, BKKBN mempunyai arah kebijakan pembangunan kependudukan tahun 2015-2019 di antaranya : a). Upaya menyetarakan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana (KKB); b). Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KKB di pusat dan daerah, serta c). Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai. Upaya peran BKKBN sebagai institusi yang menitikberatkan pada pengendalian penduduk menghadapi fase akhir transisi demografi. Masih minimnya penelitian yang mengawal perubahan dinamika demografi, sehingga perlu dilakukan kajian terkait kondisi dinamika kependudukan untuk segmentasi provinsi yang sudah memasuki *windows of opportunity* secara konteks transisi demografi wilayah tersebut berada masa akhir bonus demografi.

Semoga hasil penelitian ini, memberikan manfaat dan input bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan program pembangunan kependudukan dimasa depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras mengumpulkan data dilapangan dan merumuskan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Kami juga ucapakan kepada seluruh informan baik di organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten maupun masyarakat yang telah berkenan berpartisipasi aktif dalam penelitian ini.

Demikian, kami menyadari dan memerlukan saran dan kritik yang membangun agar hasil penulisan ini dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Jakarta, Desember 2018
Plt. Kepala Puslitbang Kependudukan

Zahrofa Hermiwahyoeni,SH, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Pengertian Transisi Dmeografi Lanjut	6
2.2 Pengertian Bonus Demografi	7
2.3 Kebijakan Kependudukan	8
2.4 Penelitian Sebelumnya	9
2.5 Alur pikir	13
BAB III Metodologi Penelitian	
3.1 Desain Penelitian	14
3.2 Pemilihan Lokasi Penelitian	14
3.3 Informan	15
BAB IV Hasil Penelitian	
4.1 Provinsi Sulawesi Utara	16
4.2 Provinsi Jawa Timur	31
4.3 Provinsi Bali	43
BAB V Analisis SWOT	
5.1 Provinsi Sulawesi Utara	50
5.2 Provinsi Jawa Timur	51
5.3 Provinsi Bali	52
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Peserta FGD di Kab. Molangan Mongondow	19
Tabel 4.2	Peserta FGD di Kab Sampang	42
Tabel 4.3	Peserta FGD di Kab Karangasem	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pemetaan Transisi Demografi Menurut Provinsi	2
Gambar 1.2	Alur Pikir	13
Gambar 4.1	Tren Rasio Ketergantungan Umur Provinsi Sulawesi Utara	16
Gambar 4.2	Tren Rasio Ketergantungan Umur Provins	31
Gambar 4.3	Kondisi Pendidikan di Jawa Timur	34
Gambar 4.4	Kasus Reproduksi di Jawa Timur	35
Gambar 4.5	Capaian Penyerapan Tenaga Kerja	36
Gambar 4.6	Perkembangan Koperasi	37
Gambar 4.7	Tren Rasio Ketergantungan Umur di Provinsi Bali	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

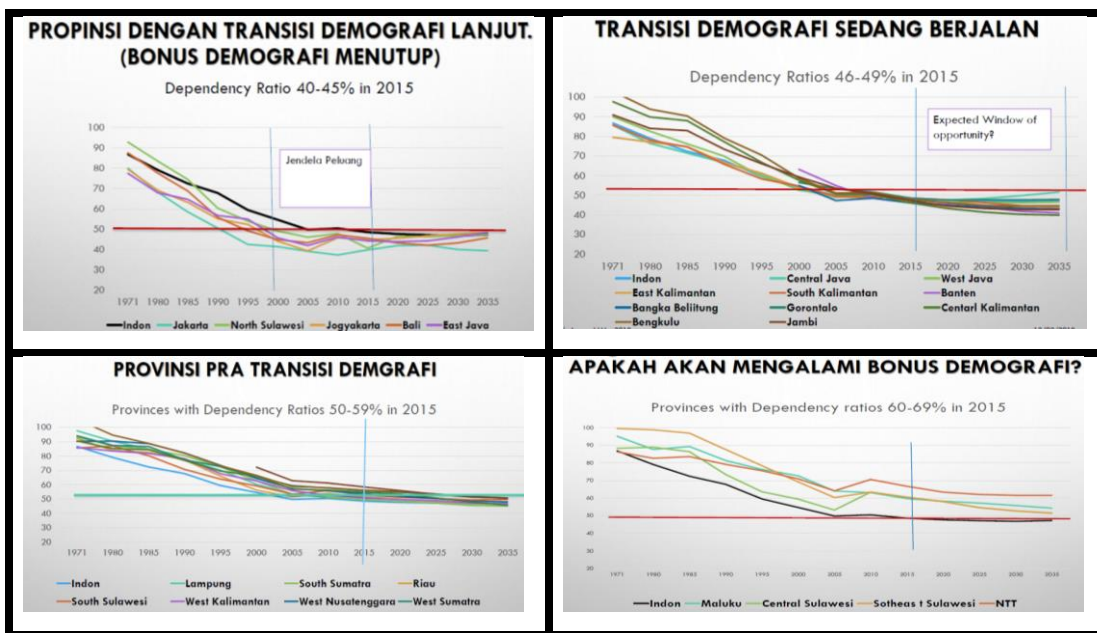
Indonesia menghadapi masa bonus demografi sebagai dampak positif pemerintah yang telah menurunnya fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian bayi) sejak era orde baru. Melalui program keluarga berencana (KB) telah merubah struktur penduduk dan mengakhiri fase transisi demografi. Sejak tahun 1970 pemerintah berupaya keras menurunkan angka fertilitas yang tinggi (sekitar TFR=5,6) menuju TFR rendah (2,1). Lima dekade pembangunan kependudukan ini berhasil menurunkan angka fertilitas dan angka mortalitas untuk menyelesaikan seluruh tahapan transisi demografi di Indonesia. Mantra (1997) menyebutkan transisi demografi dengan istilah lain yaitu transisi vital dimana Indonesai akan menyelesaikan transisi vital pada tahun 2015. Berakhirnya transisi demografi menyebabkan perubahan struktur umur penduduk dimana persentase jumlah penduduk produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif.

Transisi demografi menghasilkan masa bonus demografi, dimana populasi penduduk produktif separuh lebih dari populasi penduduk non produktif. Sehingga angkatan kerja melimpah, kondisi tersebut jika dimanfaatkan secara optimal pada puncak bonus demografi atau *windows of opportunity* yang diperkirakan tahun 2020-2030 akan menjadi berkah bagi pembangunan di Indonesai. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan berakhir tahun 2036 mendatang.

Tahun 2020-2030 diyakini oleh beberapa demografer sebagai momentum bonus demografi di Indonesia. Bonus demografi merupakan kondisi ideal yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomis dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk non produktif. Semakin besar

jumlah penduduk produktif diharapkan semakin besar pula jumlah tabungan dari penduduk produktif yang dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan demikian terbentuk bonus demografi. Sementara itu, sejak reformasi konstruksi pembangunan kependudukan bukan lagi sentralisasi namun berubah menjadi otonomi daerah. Masing-masing daerah mempunyai kewenangan mengelola kebijakan kependudukan yang berbeda-beda. Sehingga perkembangan keberhasilan pembangunan kependudukan dimasing-masing daerah tidak sama dan ada disparitas yang cukup tinggi.

Gambar 1.1 Pemetaan Transisi Demografis Menurut Provinsi





Rapat koordinasi nasional (Rakernas) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BKKBN salah satunya topik yang diangkat yaitu meraih bonus

demografi. Prof Toening pada kesempatan

tersebut menyajikan makalah yang berisi pemetaan transisi demografi per provinsi untuk melihat potensi bonus demografi (*demographic dividend* atau *demographic gift*) dengan membagi 4 kriteria yaitu provinsi dengan transisi demografi lanjut, transisi demografi sedang berjalan, pra transisi demografi dan provinsi yang masih dipertanyakan apakah provinsi tersebut akan mengalami bonus demografi. Gambar 2 merupakan gambaran di tingkat provinsi kondisi transisi demografi yang dikaitkan peluang bonus demografi. Beberapa provinsi mempunyai *dependency ratio* 40-45%, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Lebih lanjut dikatakan bahwa provinsi tersebut diperkirakan berada pada transisi demografi lanjut atau jendela peluang untuk memperoleh bonus demografi yang menutup. Ini merupakan kondisi ideal bagi pemerintah terutama pemerintah daerah untuk melakukan intervensi yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diharapkan agar tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan penduduk yang merata dan berkeadilan.

Entah disadari atau belum oleh pemerintah daerah terutama provinsi, bahwa wilayahnya berada pada kondisi transisi demografi lanjut yang secara perhitungan persentase penduduk produktif dengan non produktif sudah melewati pada titik terendah “*windows of opportunity*” yang diartikan sebagai melimpahnya angkatan kerja. Saat titik terendah tersebut waktunya sangat singkat dan hanya sekali dalam transisi demografi. Jika tidak dioptimalkan transisi demografi lanjut tersebut akan berdampak pada beban pembangunan selanjutnya yaitu *Aging Polulation*. Kebijakan kependudukan pada provinsi yang memasuki transisi demografi lanjut mempunyai perlakuan khusus akan program pengendalian penduduk yaitu menahan angka fertilitas tetap 2,1 anak. Belajar dari negara-negara lain yang mengalami kesulitan menahan angka fertilitas 2,1. Kenyataanya bahwa kalau sudah terlanjur turun angka fertilitas sulit dinaikkan. Saat ini terdapat 5 provinsi yang memasuki fase transisi demografi lanjut yang bonus demografinya akan menutup yaitu DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Utara serta Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Negara yang besar dengan populasi penduduk nomer 4 peringkat dunia dan wilayah terbentang luas dengan persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata menjadi permasalahan klasik pembangunan kependudukan. Pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terpenuhi. Setiap daerah mempunyai keterbatasan dan keberhasilan dalam menurunkan fertilitas dan mortalitasnya. sehingga masing-masing daerah berbeda-beda struktur umur penduduknya. Seperti dijelaskan di latar belakang bahwa transisi demografi yang menyebabkan perubahan struktur umur dan proporsi antara penduduk produktif dan non produktif menghasilkan peluang Bonus demografi.

Bonus demografi jika dimanfaatkan dapat menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan modal percepatan pemerataan pembangunan.

Pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana pemahaman pemerintah daerah terhadap bonus demografi dan pemanfaatannya bagi pembangunan daerah?
2. Bagaimana kepedulian pemerintah daerah yang berada pada transisi demografi lanjut dan kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan potensi dari bonus demografi menutup?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang terkait dengan transisi demografi lanjut (bonus demografi menutup) di provinsi.

Tujuan Khusus :

1. Mengetahui pemahaman pemerintah daerah terhadap bonus demografi dan pemanfaatannya bagi pembangunan daerah.
2. Mempelajari ketersediaan data kependudukan dan pemanfaatannya dalam meraih bonus demografi.
3. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi dari bonus demografi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dan pelaksana program dalam merencanakan pembangunan kependudukan terkait kepedulian data kependudukan dan pemanfaatan bonus demografi di provinsi.

BAB II

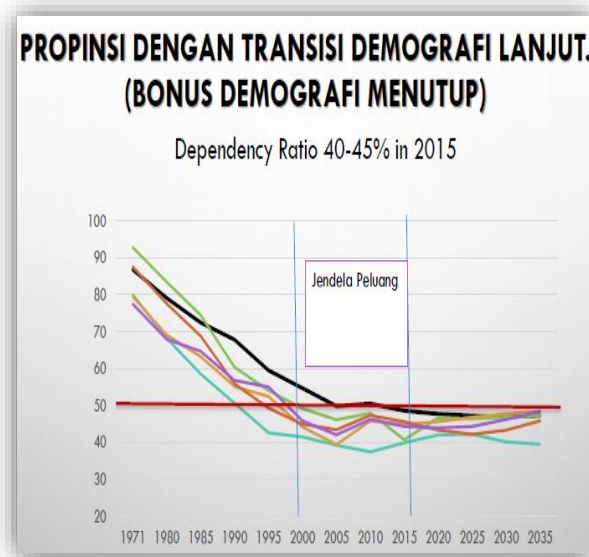
TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Transisi Demografi Lanjut

Transisi demografi merupakan istilah kependudukan yang menggambarkan perubahan struktur umur penduduk sebagai dampak dari penurunan kelahiran maupun kematian dalam jangka panjang. Ansley J. Coale (1973) menyebutkan *The demographic transition is a specific change in the reproductive behaviour of a population that is said to occur during the transformation of a society from a traditional to a highly modernized state.*

Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo (2018), menyatakan bahwa Indonesia tahun 1980an sudah mengalami masa transisi demografi sampai saat ini hanya membutuhkan 3 dekade.

Kekuatan pemerintah yang membuat gerakan keluarga berencana yang masif menyebabkan transisi demografi lebih cepat dibandingkan dengan negara maju. Meskipun penurunan antar provinsi masih mempunyai disparitas yang tinggi.



Sehingga, perlunya di Indonesia memetakan provinsi menurut status bonus demografi yaitu provinsi dengan bonus demografi lanjut, provinsi dalam awal transisi demografi, provinsi pra transisi demografis dan provinsi yang belum tentu bisa mencapai bonus demografi.

Transisi demografis lanjut merupakan kondisi kependudukan dimana komposisi rasio ketergantungan umur (RKU) 40-45 persen. Mengapa RKU 40-45 persen sebagai transisi demografis lanjut, sebab pada posisi tersebut berada pada area jendela peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi. Proporsi penduduk berusia produktif lebih banyak dibandingkan yang non produktif. Jendela peluang hanya terjadi satu kali dalam periode masa bonus demografi pertama. Tahap setelah itu, masuk pada fase *aging population*.

**PROVINSI TRANSISI DEMOGRAFI LANJUT
(DEPENDENSI RASIO 40-46%)**

	Jakarta	Yogyakarta	Bali	Est Java	North Sulawesi	Indonesia
TFR -SDKI 2017	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.4
% CPR-Modern- SDKI 2017	50.5	57.8	54.8	63.1	61.0	57.2
IMR SDKI 2017	17	17	29	28	43	24
% 0-14 (2015) Proy 2010-2035	24.8	21.8	24.5	23.2	25.8	27.3
% 15-64 (2015) Proy 2010-2035	71.5	69	68.7	69.3	68.2	67.3
% 60+ (2015) Proy 2010-2035	6.5	13.4	10.3	11.5	9.7	8.5
GDP Growth % 2015	6.5	5.3	6.7	7.3	7.9	6.3
Poverty rate (%) 2015	3.6	13.2	5.2	12.3	9.0	11.3
IPM 2015	79	78	73	69	70	6
% urban 2010	100	70.5	65.5	51.1	49.8	

2.2. Pengertian Bonus Demografi

Bonus demografi atau *Demographic Devidend* adalah dampak yang dihasilkan dari terjadinya perubahan struktur umur penduduk suatu daerah. Adioetomo (2018) berpendapat bonus demografi merupakan dampak perubahan struktur umur penduduk suatu bangsa. Struktur umur disini diartikan sebagai perubahan komposisi penduduk menurut umur. Dalam demografi sering menggolongkan umur dalam satu tahun maupun 5 tahunan. Ukuran yang digunakan dalam melihat perubahan komposisi penduduk salah satunya *dependency ratio* atau angka ketergantungan umur yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang golongan usia produktif

(umur 15-64 tahun). Kondisi sekarang proporsi anak-anak mengecil dan proporsi penduduk usia kerja meningkat.

Secara makro, peningkatan usia kerja yang diiringi kualitas dan produktivitas pekerja dapat menghasilkan upah yang meningkat yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Adioetomo menyebutkan itulah bonus demografi. Bonus demografi tidak serta merta terjadi, melainkan harus diiringi dengan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja.

Bloom, dkk (2003) bonus demografi lebih dikaitkan pentingnya struktur umur terhadap perubahan demografi dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur usia suatu negara dapat memiliki efek signifikan pada kinerja ekonominya. Negara-negara dengan proporsi anak yang tinggi cenderung mencurahkan sumber daya proporsi yang tinggi untuk perawatan mereka, yang cenderung menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, jika sebagian besar populasi suatu negara termasuk dalam kelompok usia kerja, penambahan produktivitas kelompok ini dapat menghasilkan a "Dividen demografis" dari pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi kebijakan itu untuk mengambil keuntungan dari ini ada di tempat. Bahkan, efek gabungan dari populasi usia kerja yang besar dan kesehatan, keluarga, tenaga kerja, keuangan, dan kebijakan sumber daya manusia dapat memengaruhi siklus penciptaan kekayaan yang baik.

2.3. Kebijakan Kependudukan

Selama transisi demografis, penurunan tingkat kelahiran dan kematian menyebabkan perubahan penting dalam komposisi umur penduduk. Secara umum, negara-negara pada tahap awal transisi memiliki struktur umur yang lebih muda daripada negara-negara di tahap selanjutnya.

Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 (2) menyebutkan pengendalian penduduk dan

keluarga berencana sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dijelaskan dalam lampiran tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/Kota pada point N terdapat 4 sub urusan yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan standarisasi dan sertifikasi. Provinsi mempunyai kewenangan untuk pemetakan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah setempat. Turunan dari kewenangan tersebut, diatur ruang lingkup kewenangan organisasi pemerintah daerah (OPD) provinsi untuk menyediakan informasi peringatan dini dampak kependudukan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Bloom, dkk (2003) menyebutkan negara yang menghadapi bonus demografi perlu membuat kebijakan untuk perawatan kesehatan dan pendapatan pensiun di masa depan. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan bagaimana memaksimalkan dan menangkap bonus demografi dengan mempercepat transisi demografis, dan memungkinkan tenaga kerja yang melimpah untuk diserap secara produktif di pasar. Bonus demografis ini dapat membantu menghasilkan periode pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti yang terjadi di beberapa ekonomi Asia Timur. Bloom mengingatkan pentingnya lingkungan kebijakan pemerintah terutama dibidang : *public health, family planning, education, and economic policies that promote labor-market flexibility, openness to trade, and savings.*

2.4. Penelitian Sebelumnya

Kebijakan kependudukan terkait 3 hal yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa penelitian terkait kebijakan kependudukan. Noor, M (2015) Kebijakan Pembangunan kependudukan dan Bonus Demografi dimana asumsi dasar untuk memahami bonus demografi adalah kondisi komposisi penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam

rentangan waktu tertentu. Idealnya, masyarakat dapat mengetahui apa bonus demografi tersebut, yaitu dengan memahami posisi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dengan pemangku kebijakan dengan menyadari pentingnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung agar potensi-potensi yang dimiliki oleh penduduk-penduduk usia produktif tersebut optimal dan maksimal. Harapannya adalah munculnya kesadaran akan peran strategis penduduk usia produktif, terutama kaum muda sebagai 'motor penggerak' bangsa. Pada dasarnya ada syarat untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi yaitu, terwujudnya penduduk berkualitas dengan tersedianya pendidikan yang baik, kemudian tersedianya layanan kesehatan yang baik, memiliki etos kerja, dan kebijakan yang menopang usia produktif agar berdaya guna. Logika berfikirnya adalah, bagaimana akan terciptanya penduduk berkualitas, sementara masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara merata pada tingkat jenjang yang tinggi sebagai syarat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik.

Jika ada penyediaan fasilitas seperti sekolah-sekolah, apakah sudah sebahagian besar dari rakyat Indonesia mampu untuk mengikutinya terutama secara finansial karena masih mahal biaya sekolah atau peluang yang diberikan, termasuk akses dan fasilitas yang memadai, terutama pada daerah-daerah terpencil atau perbatasan. Dengan demikian, ketika bonus demografi adalah pembicaraan akan peluang yang dapat diambil dari penduduk yang hanya satu kali dimiliki suatu bangsa, maka, perlu dukungan dari berbagai pihak yang terkait lainnya, seperti masalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja bahkan agama. Oleh karena itu perlu adanya gerakan bersama untuk mensosialisasikan, menemukan strategi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk meraih peluang bonus demografi ini.

Zulham, T dan Basyiran, B .2015 menyebutkan Bonus demografi akan terjadi dalam rentang tahun 2010-2020 di kota ini dan tingkat persiapan dalam sektor ketenagakerjaan sejauh ini belum optimal. Ini mengancam Banda Aceh tidak dapat merasakan manfaat dari windows of opportunity ini. Sehingga diperlukan adanya kebijakan dan program pemerintah kota dalam mempersiapkan penduduk usia produktif yang dapat menyongsong tantangan ekonomi daerah di masa depan, terutama dengan memperkuat sektor ketenagakerjaan dan kualitas pendidikan. Perlu adanya kebijakan dan program pemerintah kota dalam mempersiapkan penduduk usia produktif yang dapat menyongsong tantangan ekonomi daerah di masa depan, terutama dengan memperkuat sektor ketenagakerjaan dan kualitas pendidikan formal. Perlu dilakukan pendidikan keterampilan kepada kaula muda agar mereka dapat menyiapkan dirinya menuju kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang handal. Pendidikan informal merupakan jawaban yang harus ditempuh oleh kaula muda yang berkeinginan untuk maju. Tentunya pemerintah dapat menyediakan atau memberikan dana yang lebih banyak untuk kaum muda yang potensial dalam rangka meningkatkan kapasitas diri untuk menghadapi masa globalisasi di masa mendatang.

Rimbawan (2014) membahas tentang bonus demografi di Provinsi Bali. Bali diproyeksikan mengalami bonus demografi puncak periode 2020 sampai 2030, dengan dependency ratio antara 42,2 sampai 43,3 persen. Manfaat bonus demografi tidak langsung dapat dirasakan, sehingga diperlukannya kebijakan pemerintah seperti memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan. Bonus demografi akan menjadi bencana jika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, keahlian rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang menyebabkan minimnya produktivitas. Persyaratan untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai engine of economic growth nampaknya belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan kualitas SDM-nya relatif masih rendah. Human investment

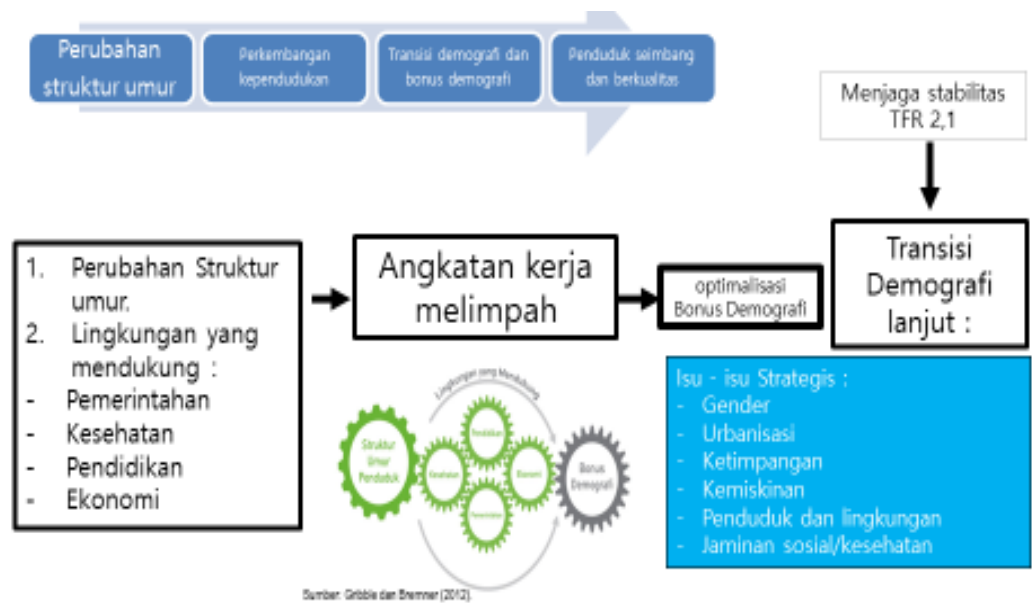
bersifat jangka panjang sedangkan bonus demografi sudah di depan mata. Di sisi lain investasi yang dilakukan pemerintah setempat relatif rendah karena sebagian besar dana APBD dialokasikan untuk biaya rutin sebagai konsekuensi dari birokrasi yang gemuk. Sebaliknya, peluang investasi swasta tidak banyak karena Bali miskin sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan penduduk usia produktif yang melimpah karena terjadinya bonus demografi puncak tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Meita, dkk (2016) menyatakan Pembangunan perlu didasarkan pada realita kependudukan secara berkelanjutan. Bonus demografi terjadi karena jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Struktur penduduk di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh penduduk usia produktif pada periode 2010-2020. Tujuan penelitian ini membandingkan tiga kondisi yang berbeda untuk mengetahui perubahan struktur kependudukan periode 2010, 2014 dan 2020 berdasarkan proyeksi penduduk hasil SP 2010.

Rasio ketergantungan terus mengalami penurunan sehingga beban tanggungan penduduk usia produktif menjadi berkurang. Variabel yang digunakan adalah kependudukan, ekonomi, kesejahteraan penduduk (pendidikan dan kesehatan) serta ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisis faktor sehingga didapatkan tiga faktor utama yaitu faktor pembangunan manusia, kualitas dan kuantitas penduduk serta perekonomian sektor manufaktur. Hasil pengelompokan dengan *Ward's Method* berdasarkan faktor utama pada masing-masing tahun 2010 dan 2014 serta tahun 2020 (variabel kependudukan) didapatkan 3 kelompok. Variabel kependudukan cukup penting dalam perubahan transisi demografi, dimana kelompok 1 merupakan daerah pertanian kelompok 2 daerah perdagangan dan jasa serta kelompok 3 daerah industri. Variabel pembeda antar kelompok

adalah kepadatan penduduk dan jumlah pekerja jasa di tahun 2010 dan 2014, sedangkan di tahun 2020 adalah jumlah penduduk perkotaan.

Gambar 1.2 Alur Pikir



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang melalui pendekatan kualitatif. Data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD). Wawancara mendalam dilakukan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan penyusun kebijakan, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dinas tenaga kerja dan dinas perindustrian serta perwakilan BKKBN di provinsi. Selain itu, dilakukan FGD ditingkat lini lapangan diantaranya dengan wanita usia subur dan remaja di desa maupun di sekolah.

Data kualitatif juga berupa dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan laporan pelaksanaan kebijakan dimasing-masing dinas. Data kualitatif digunakan untuk mengetahui tren dan perkembangan kebijakan dimasing-masing dinas.

3.2. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berdsarkan pemetakan yang dilakukan oleh Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo yaitu dipilih provinsi yang berada pada wilayah transisi demografi lanjut yaitu Sulawesi Utara (sulut), Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan ditingkat kabupaten/kota ditentukan berdasarkan kondisi wilayah yang rendah IPMnya yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Kabupaten Sampang (Jatim) dan Kabupaten Karang Asem (Bali).

3.3. Informan dan Focus Group Discussion

Adapun informan yang diwawancarai dibagi menjadi 2 yaitu di tingkat provinsi dan kabupaten. Meskipun dibagi 2 namun dinas-dinas yang dikunjungi masih sama nomenklaturanya. Berikut daftar informan yang diwawancarai yaitu :

1. Tingkat provinsi
 - a. Perwakilan BKKBN provinsi : kepala perwakilan dan kabid pengendalian penduduk.
 - b. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) : kepala dinas dan kabid sosial dan ekonomi.
 - c. Dinas pendidikan : kepala dinas dan sekretaris
 - d. Dinas Kesehatan : kepala dinas dan kabid
 - e. Dinas perindustrian : kepala dinas dan kabid
 - f. Dinas usaha mikro dan koperasi : kepala dinas dan kabid
 - g. Dinas tenaga kerja : kepala dinas dan kabid
2. Tingkat kabupaten/kota
 - a. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) : kepala dinas dan kabid sosial dan ekonomi.
 - b. Dinas pendidikan : kepala dinas dan sekretaris
 - c. Dinas Kesehatan : kepala dinas dan kabid
 - d. Dinas perindustrian : kepala dinas dan kabid
 - e. Dinas usaha mikro dan koperasi : kepala dinas dan kabid
 - f. Dinas tenaga kerja : kepala dinas dan kabid
 - g. Dewan Perwakilan Rakyat : komisi D

FGD dilakukan dimasyarakat dengan peserta wanita usia subur (WUS). Selain itu, FGD dilakukan dengan remaja di desa maupun di sekolah.

BAB IV

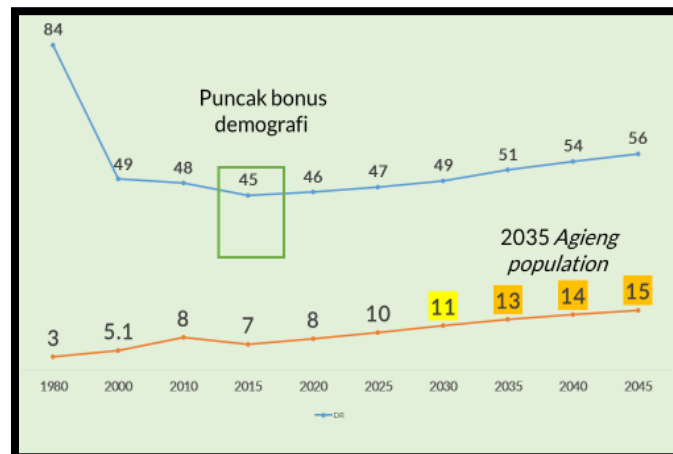
HASIL PENELITIAN

Menggali pemanfaatan bonus demografi di wilayah transisi demografi lanjut (bonus menutup) tidaklah mudah. Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo memberikan batasan konsep transisi demografi lanjut disebutkan bahwa wilayah yang rasio ketergantungan umur penduduknya sebesar 44-45 persen sudah berada di transisi demografi lanjut. Bloom, dkk (2003) kebijakan pemerintah perlu memperhatikan kesehatan publik, keluarga berencana, pendidikan, dan kebijakan ekonomi yang mempromosikan fleksibilitas pasar kerja, keterbukaan terhadap perdagangan, dan tabungan masyarakat. Bonus demografi tidak serta merta terjadi jika tidak diiringi oleh kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja dalam jangka panjang.

4.1. Provinsi Sulawesi Utara

Rasio ketergantungan umur (RKU) atau *dependency ratio* (DR) di Provinsi Sulawesi Utara pada gambar 4.1 menunjukkan tahun 2015 sebagai puncak bonus demografi. Tahun 2030 secara berlahan Provinsi Sulawesi Utara meninggalkan masa bonus demografi menuju *ageing population*.

Gambar 4.1 Tren Rasio Ketergantungan Umur di Sulawesi Utara, 1980-2045



Sehingga dalam rentang waktu tahun 2015-2025 sebagai masa akhir bonus demografi pertama atau fase bonus demografi menutup. Kondisi tersebut sudah dipahami oleh pemerintah daerah. RPJMD 2016-2021 di bab 7 menyebut “bonus demografi” tapi dengan istilah lain **window opportunity**.

Meskipun Provinsi Sulawesi Utara sejak 2014 menikmati bonus demografi, namun bermasalah dengan penyerapan tenaga kerja. Tahun 2015 persentase pengangguran sekitar 7.2 persen dan diharapkan tahun 2019 turun menjadi 6.3 persen. Sedangkan kemiskinan sudah terendah di pulau Sulawesi yaitu 7.1 persen pada tahun 2015 dan diharapkan tahun 2019 menjadi 5.1 persen.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara menyusun upaya kebijakan yang merupakan inovasi daerah adalah :

- a. Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin (KIS)
- b. Pemberian Bea Siswa Miskin SD/MI, SLTP/MT, dan SMU/SMK
- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA)
- d. Peningkatan Infrastruktur Dasar di 15 Kabupaten/Kota
- e. Penguatan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumberdaya lokal dan Industri Kreatif
- f. Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Keahlian Khusus
- g. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) untuk 1000 rumah
- h. Pemberian Transfer of Asset pada Rumah Tangga Miskin

..... di Sulawesi Utara ditandai dengan adanya window opportunity yang sudah dinikmati sejak tahun 2014. Hal ini ditandai dengan rasio ketergantungannya yang menunjukkan nilai positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non- produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030.

Upaya bidang pendidikan dengan program-program diantaranya :

- a. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.
- b. Pengembangan dan peningkatan standar infrastruktur sekolah-sekolah, serta pengembangan teknologi informasi pendidikan.
- c. Pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi.
- d. Peningkatan jumlah sarana dan mutu pendidikan nonformal, juga perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kejuruan dan politeknik.
- e. Perlakuan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan, juga peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan.
- f. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas pendidikan (formal dan informal), peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan, juga pengembangan laboratorium penelitian terpadu.
- g. Penerapan pendidikan budi pekerti sejak dini juga peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
- h. Pengembangan teknologi informasi, juga perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan kejuruan dan politeknik.
- i. Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa miskin.

Selain itu, ada program peningkatan kesejahteraan melalui Pembangunan rumah layak huni dan rusunawa bagi penduduk miskin serta perbaikan kawasan perumahan/pemukiman di wilayah sangat miskin, Peningkatan promosi produk UMKM, pengembangan ekonomi kreatif lokal, dan pemantapan serta optimalisasi fungsi kelembagaan Koperasi. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan, Pembangunan dan peningkatan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan,

peternakan, dan perikanan serta Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku.

Wawancara Lapangan

Berikut akan disajikan hasil wawancara pengumpulan data lapangan di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 02 – 10 September 2018 dengan informan yang dapat diwawancarai diantaranya :

a. Wawancara di tingkat provinsi

- Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
- Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
- Sekretaris Dinas kependudukan, catatan sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara
- Kabid pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
- Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
- Akademisi dari Universitas Samratulangi

b. Wawancara di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow

- Kepala dinas Bappeda
- Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian
- Kasubag umum dan kepegawaian Dinas pendidikan
- Kepala dinas koperasi
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- UPTD

Selain wawancara, tim peneliti juga melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) bertempat di desa Mopait kecamatan Lolayan kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 4.1. Daftar Peserta FGD WUS

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Jumlah Anak	Pekerjaan	kesertaan ber-KB
1	Nuriati	46	SD	4	ibu rumah tangga	tidak pakai
2	Nining D	39	SD	3	ibu rumah tangga	suntik
3	Karce Bulut	43	SMP	3	ibu rumah tangga	MOW
4	Doria Longkun	35	SD	2	ibu rumah tangga	suntik
5	Susnawin Lii	39	SMA	3	ibu rumah tangga	implan
6	Indawati	38	SD	4	ibu rumah tangga	MOW

Hasil temuan dilapangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala perwakilan BKKBN Sulut

Menyebutkan program KKBPK di transisi demografi menunjukkan keberhasilan penurunan CPR dari waktu ke waktu meskipun angkanya masih diatas nasional, meskipun demikian angka fertilitas dibawah angka nasional. Upaya sosialisasi pendewasaan usia kawin pertama (UKP) dilakukan di kabupaten dan kota, ada program “Mama Bahagia” yaitu program yang bertujuan menyelamatkan remaja bahaya kesehatan reproduksi dan penundaan usia perkawinan. Terdapat kekhawatiran perkawinan dini meningkat, sehingga perlu perhatian BKKBN untuk mengantisipasi kenaikan ASFR 15-19 th.

Terkait bonus demografi, sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi ke pemerintah daerah. Hal yang mencemaskan dan bisa mengancam bonus demografi yaitu kebiasaan masyarakat Sulut yang suka berpesta dan konsumtif. Selain itu, terdapat kelemahan di internal dimana sumber daya manusia (SDM) dibidang kependudukan kurang menguasai program kependudukan. Bidang kependudukan masih dianggap sebagai jabatan yang kurang dipandang. Padahal, kajian-kajian kependudukan di Sulut masih perlu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

2. Dinas koperasi dan UMKM

Isu bonus demografi dan pengetahuannya masih minim. Upaya dinas koperasi untuk meningkatkan usaha ekonomi tidak jauh dari ikan/hasil laut dan hasil bumi seperti kacang-kacangan. Pernah dinas UMKM melakukan misi dagang ke Bandung. Peran dinas UMKM provinsi salah satunya melakukan pembinaan ke dinas koperasi dan UMKM kabupaten. UMKM dikabupaten dapat bantuan dari kementerian sesuai jumlah catatan UMKM yang ada diprovinsi.

RPJMD 2016-2021 menyantumkan kegaitan strategis dinas koperasi dan UMKM yaitu pengembangan usaha dengan program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM. Jumlah individu usia 15 sampai > 60 tahun dari keluarga miskin yang tidak bekerja. Pada tahun 2016 sudah mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016.

Permasalahan dinas koperasi salah satunya banyak koperasi yang sudah berdiri tidak dapat melakukan rapat akhir tahun (RAT) selama 3 tahun berturut-turut sehingga terancam dibubarkan. Ada sekitar 1.645 koperasi yang sudah ada akan dibubarkan. Upaya menyehatkan usaha koperasi melalui sertifikasi koperasi. Setiap koperasi yang berjalan 2 tahun maka harus mengurus sertikat nomer induk koperasi. Alhasil dari 2.800 koperasi baru 200an koperasi di Sulut yang bersertifikat.

3. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB

Dinas ini masih baru, dan belum mendapat dukungan anggaran yang memadai. Dalam RPJMD 2016-2021 dinas kependudukan, catatan sipil dan KB tidak masuk dalam kegiatan strategis SKPD-ODSK. Dinas KB bergabung dengan dukcapil tahun 2017 sehingga masih

tahap belajar dan penyesuaian program. Sementara untuk program kependudukan dan KB masih bergantung pada perwakilan BKKBN Sulut. Dinas tersebut masih melaksanakan kegiatan fokus pada dukcapil saja. Terkait **bonus demografi sudah masuk dalam RPJMD**.

4. Akademisi Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)

Informan menyatakan sudah melakukan penelitian dan kajian kependudukan. Sekarang sedang menyusun dokumen GDPK di kabupaten Bolaang Mongondaw. Kajian penelitian yang telah dilakukan diantaranya terkait perkawinan muda. Bonus demografi yang terjadi di Sulawesi Utara masih ditemukan kejadian usai kawin dini sehingga angkatan kerja dapat menjadi beban pembangunan jika fungsi – fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik.

PSKK FISIPOL telah mendampingi penyusunan GDPK di 3 kabupaten/kota. Kuantitas saja namun kualitas penduduknya. Bukan hanya fertiltias dan mortalitas yang diturunkan, di kaupaten tertentu kita mengendalikan penduduk namun jumlah penduduk kita berkurang? Bagaimana jumlah penduduk kurang dari semestinya 82 km per 100. GDPK dan rencana aksi daerah pembangunan kependudukan daerah. Menyusun rencana aksi daerah bekerja sama dengan Bappeda dengan FGD pada SKPD terkait. GDPK di Kota Kota Mobagu dan rencana aksi daerah sudah dilakukan. Dokumen aksi daerah kependudukan berada di Bappeda. Belum ada pembahasan transisi demografi per kabupaten/kota.

Ada keseimbangan antara mengikuti program KB dengan kesadaran dan pola berpikir yang lebih maju sudah merasakan manfaat membatasi kelahiran. Sehingga kelahiran di Sulawesi Utara relatif rendah. Migrasi penduduk lebih bersifat lokal antar kabupaten/kota. Pusat perdagangan menjadi tujuan migrasi lokal.

Dampaknya bonus demografi belum dirasakan sekarang. Sosialisasi GDPK ke pemerintah daerah juga disampaikan dengan bonus demografi. Sampai sekarang pemerintah daerah belum yang merasakan dampak bonus demografi. Pembagian transisi demografi, menurut informan provinsi Sulut **sedang berjalan transisi demografinya.**

Kepala daerah sekarang sudah peduli lansia. Bahayanya piramida penduduk terbalik yaitu lansia yang besar, anak-anak lebih kecil. Idealnya yang besar di tengah. Jangan sampai terbalik. Harapan hidup sudah meningkat seharusnya diiringi kualitas lansia. Pemerintah daerah perlu memberdayakan lansia agar tidak menjadi beban pembangunan. Tapi mereka ada aktivitas positif dan tidak menjadi beban keluarga. Sudah banyak lansia menjadi baby sister cucunya.

5. Bappeda

Dukungan program kependudukan di kabupaten/kota dalam bentuk koordinasi dan konsolidasi sinkronisasi difasilitasi bappeda. Masalah kependudukan disulawesi utara kami punya strategi, 2016 sudah ada grand desain yang belum sempurna. Dari grand disain di level provinsi bekerjasama dengan bkkbn salah satu pengendalian penduduk bekerja sama dengan dinas terkait secara bersama-sama. Salasatu strateginya 2017-2018 ketika da kerjasama dengna bkkbn melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan perangkat daerah di provinsi dan kabupaten kota dalam rangka pengendalian penduduk. yang diundang dians terkait, menggandeng Bappeda dalam rangka sinkronisasi program kependudukan dalam RPJMD di kabupaten. 2017 sudah mendatangi Bappeda kabupaten kota untuk menyampaikan grand desain. 2018 sudah ada beberapa kabupaten/kota sudah menyusun grand desain. Ada yang baru mensosialisasi. **Dinas terkait**

keroyokan menyongsong bonus demografi. 2016 bonus demografi sudah menjadi isu.

Dukcapil dan KB masih baru sehingga masih lebih bekerjasama dengan BKKBN perwakilan. Bonus demografi dikerjakan secara keroyokan dengan dinas-dinas terkait. Bappeda mendukung program kependudukan dan KB. Tahun 2012 di Sulut sudah punya GDPK. Upaya sinkronisasi program KKBP di RPJMD kabupaten/kota sudah dijalankan. Tahun 2016 bonus demografi sudah menjadi isu dan dimasukkan dalam dokumen GDPK. Sementara baru ada **4 kabupaten yang mempunyai GDPK.**

Permasalahan kependudukan di provinsi Sulut diantaranya masih ada beberapa kabupaten yang kemiskinan masih tinggi yaitu kabupaten Sangihe, Bolaang Mongondaw Selatan dan Minahasa Tenggara. Pemerintah membuat program ODE ESKA (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan). Sementara ini, kebijakan pemerintah daerah fokus pada pengentasan kemiskinan sedangkan tahun depan akan menggarap pengangguran.

6. Dinas Kesehatan

RPJMD 2016-2019 bidang kesehatan bidang prioritas yaitu kesehatan masyarakat dengan program upaya kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; bidang Gizi dengan program perbaikan gizi; bidang lingkungan sehat dengan program pengembangan lingkungan sehat; dan bidang pelayanan kesehatan dengan program standarisasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan penduduk miskin, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita, Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Dinkes sementara prioritas utama pada stunting, TBC dan imunisasi. Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara salah satu yang

bermasalah stanting. **Program gisi seimbang dengan cara isi piringku.** Sedangkan **program remaja melalui pemberian tablet penambah darah untuk calon ibu.** posbindu disediakan disetiap puskesmas. Kasus kehamilan remaja yang paling tinggi di kabupaten Minahasa Utara. Terkait data kesehatan, dinkes sudah ada aplikasi data untuk pelaporan.

Setelah selesai wawancara di provinsi, tim melakukan wawancara di Kabupaten Bolaang Mongondaw. Hasil wawancara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bappeda



Kepala Bappeda masih terhitung baru, saat ditanya tentang bonus demografi belum mengetahui dan memahaminya. Sebenarnya di Kab. Bolaang Mongondow (Bol-Mong) OPD KB dan Pusat studi kependudukan Universitas Samratulangi menyusun dokumen grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) yang melibatkan lintas sektoral. Dokumen tersebut sudah memuat informasi tentang bonus demografi. Saat dilakukan pengumpulan data, pihak universitas sedang melakukan pemaparan draf GDPK tersebut.

Dokumen DGPk kab. Bol-Mong 2017-2025 sebenarnya sudah mencantumkan isu bonus demografi. Bab 2 tentang profil Kabupaten Bol-Mong menyebutkan mengacu pada struktur usia penduduk, maka Kabupaten Bol-Mong memiliki peluang besar untuk menyambut datangnya fase *windows of opportunity* yang keberadaanya hanya

sekali dan akan memberikan peluang untuk memperoleh bonus demografi. Lebih lanjut disebutkan “apakah Kabupaten Bol-Mong telah siap untuk memacu peningkatan kualitas SDM penduduk sehingga bonus demografi akan membawa berkah atau rahmat pembangunan, bukan sebaliknya sebagai beban pembangunan bagi masyarakat Bol-Mong. Rasio ketergantungan umur pada tahun 2015 diketahui sebesar 53,8. Kelemahan dalam dokumen tersebut tidak dibuat tren rasio ketergantungan umur sebelum tahun 2015 sampai 2035. Sehingga tidak diketahui kapan puncak jendela peluang atau *windows of opportunity*-nya.

2. Dinas Perindustrian

Dibawah dinas perindustrian, upaya peningkatan ekonomi mikro dilakukan dengan pelatihan ketrampilan bagi industri kecil menengah (IKM) yang jumlahnya kurang lebih 1947 IKM. Dinas menggarap IKM difokuskan pada pengolahan hasil pertanian dan perkebunan seperti minuman keras (merek cap tikus) bahan dasar aren, pengolahan gula aren, kerajinan anyaman dan pengolahan nanas.

IKM mendapat fasilitas pendampingan berupa pembinaan ketrampilan, perbaikan manajemen, kelembagaan dan mutu sekaligus pemasaran. Tren pertumbuhan IKM positif, setiap tahun jumlah IKM semakin bertambah. Bentuk badan usahanya IKM ada yang CV adapula koperasi. Setahun terdapat 50 IKM yang memperoleh pendampingan dari dinas perindustrian.

Di Kabupaten Bolmong juga terdapat perusahaan besar yang dikuasai PMA seperti pertambangan emas (USA), pabrik semen (CINA), tambang kapur (Cina), Galangan kapal ton creashar. Dimana perusahaan tersebut perizinan menjadi kewenangan pusat dan provinsi.

Kabupaten Bolmong lebih kaya sumber alam untuk pertambangan, namun industri pariwisata belum dikelola dengan baik dan produktif.

3. Dinas Pendidikan



Kabupaten Bolmong dibidang pendidikan masih tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Sulut. Masih banyak dijumpai anak putus sekolah sehingga disediakan pendidikan non formal setingkat SMA/SMK melalui kejar paket C.

Terdapat pembagian kewenangan, pendidikan SD-SMP menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan SMA keatas kewenangan berada diprovinsi, sehingga ada kaki tangan provinsi yang mengawasi pendidikan di tingkat kabupaten dengan dibentuknya UPTD untuk menangani urusan SMA/SMK. Sedikit informasi yang diperoleh di dinas pendidikan, sebab disposisi surat jatuh ke kasubag umum dan kepegawaian yang tidak faham program-program dinas pendidikan. Terkait isu bonus demografi, belum memahami dan terpapar informasinya.

4. Dinas Koperasi dan UMKM



Dinas koperasi di kabupaten Bolmong ditemui kepala dinasnya, sekaitan dengan isu bonus demografi informan belum tahu dan memahami bonus demografi. Informan menjabat kepala dinas baru beberapa bulan sehingga belum

faham program kependudukan termasuk diantaranya bonus demografi. Dinas koperasi bertugas salahsatunya melakukan pelatihan dan pembinaan UMKM. Terdapat 1400 usaha kecil menengah (UKM) yang mendapatkan ijin usaha. Disisi salin, dinas koperasi mengelola 375an koperasi (43 yang aktif) lainnya matisuri.

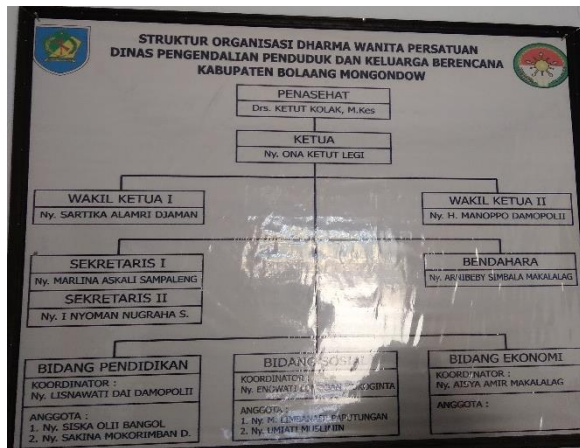
Sedikit informasi yang diperoleh saat wawancara di dinas koperasi tersebut.

5. Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi

Informasi yang diperoleh di dinas tenaga kerja Kabupaten Bolmong salahsatunya angka pengangguran sekitar 5,2 persen. Pengangguran kebanyakan justru berpendidikan SMA. Tahun 2020 pihaknya akan berencana membangun balai latihan kerja (BLK). Selama ini, pelatihan lebih dilaksanakan dengan pengiriman peserta mengikuti palatihan di Manado. Tahun 2015 diperoleh informasi pengangguran lebih banyak perempuan sekitar 8,32 persen dan laki-laki 4,69 dari total pengangguran sebesar 5,77.

Berdasarkan persentase lapangan pekerjaan utama diketahui pada tahun 2015 48 persen bekerja disektor pertanian, 31 persen sektor jasa dan 21 persen sektor industri.

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



Isu bonus demografi sudah pernah disosialisasikan. Informan menyatakan bahwa bonus demografi hanyalah retorika diforum-forum pertemuan. Informan lebih melihat bahwa bonus demografi merupakan ketahanan keluarga.

7. UPTD Dinas Pendidikan



Diperoleh informasi 2-3 persen siswa SMA mengalami Drop Out. SMK di Kabupaten Bolmong kebanyakan swasta. Jurusan SMK diantaranya perkantoran, pariwisata, perikanan, tata boga, teknik mesin ringan/perbangkalan dan pertanian.

Kabupaten Bol-Mong tersedia 18 unit SMK tersebar di 10 kecamatan dari 15 kecamatan yang unit terbanyak di kecamatan Lolak sebanyak 5 unit, sedangkan jumlah sekolah tingkat SMA terdapat 14 sekolah dan Madrasah Aliyah 11 sekolah.

Selain dilakukan wawancara ke dinas-dinas terkait, tim peneliti juga melakukan FGD ke wanita usia subur (15-49 th) dan remaja di Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondaw. Secara umum karakteristik peserta FGD dapat diuraikan sebagai berikut :

Hasil diskusi diperoleh informasi bahwa kebanyakan wanita di daerah tersebut menikah sekitar umur 20 tahun atau dibawahnya. Faktor ekonomi (kemiskinan) sehingga kebanyakan putus sekolah dan dilarang sekolah tinggi-tinggi. Ada juga kawin muda disebabkan hamil diluar nikah. Meskipun kabupaten Bolmong merupakan pemekaran dan masih nuansa perdesaan, kejadian pergaulan bebas sudah merebak dan menyebabkan kehamilan bagi remaja.

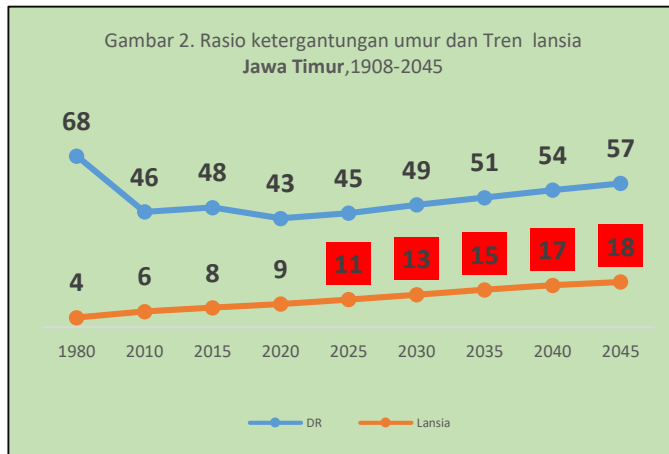
Pertanyaan tentang umur berapa sebaiknya perempuan menikah banyak yang berpendapat 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Alasannya diantaranya :

1. Matang (dewasa)
2. Sudah bisa mengurus anak dan suami
3. Bekerja dulu
4. Sekolah tinggi

Pertanyaan selajutnya tentang jumlah anak ideal, beberapa peserta FGD menyatakan 2 anak dengan alasan diantaranya tidak repot, biaya lebih sedikit, kelaurga lebih sejahtera. Sekaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi, kebanyakan peserta menggunakan IUD dan suntik. Pelayanan di puskesmas dan bidan praktek (biaya 20 ribu untuk suntik). Ada juga yang tidak pakai disebabkan faktor kesehatan (hipertensi).

4.2. Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.2 Tren Rasio Ketergantungan Umur di Jawa Timur, 1980-2045



Gambar 4.2 menunjukkan bahwa tahun 2020 provinsi Jawa Timur rasio ketergantungan umurnya paling rendah yaitu 43 persen. Secara konsep demografi, ceruk rendah rasionya sebagai puncak bonus demografi (*windows of opportunity*).

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa timur tahun 2014-2019 **tidak memasukkan** secara implisit isu bonus demografi. Bab 2 di dokumen RPJMD bagian gambaran umum kondisi daerah hanya mencantumkan kondisi demografi berupa struktur penduduk menurut jenis kelamin dan laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota.

Sekilas akan disajikan permasalahan isu strategis yang ada di dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 diantaranya :

1. Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi.
2. Belum optimalnya penanganan gizi buruk.
3. Rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki.
4. Meningkatnya TFR dari 2,1 (SDKI 2007) menjadi 2,3 (SDKI 2012).
5. Masih tingginya angka kematian bayi 30/1000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

6. Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS.
7. Tingginya angka penyalagunaan narkoba.
8. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di BLK.
9. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi.
10. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.
11. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen.
12. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas).
13. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan. Kredit UMKM hanya 29,6% total kredit.
14. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di BLK.
15. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.
16. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi.
17. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

4.2.1. **Wawancara Lapangan**

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 20-27 September 2018. Adapun informan yang dapat diwawancarai diantaranya :

a. Wawancara di tingkat provinsi

- Kabid pengendalian penduduk BKKBN Provinsi Jatim

Informan berpendapat bahwa bonus demografi sudah menjadi bahasan di musrembang oleh gubernur. Secara teknis, Jawa Timur

memperoleh **bonus demografi puncaknya di tahun 2017**. Untuk mengoptimalkan bonus demografi di Jatim sudah banyak didirikan sekolah kejuruan (SMK). Selain itu, pemerintah daerah provinsi sudah memetakan mana kabupaten/kota yang masuk peluang bonus demografi.

Dokumen GDPK di tingkat provinsi sudah dibuat dan akan dilakukan evaluasi. GDPK yang disusun sudah memuat 5 pilar. Kota Surabaya juga sudah menyusun dan memanfaatkan GDPK untuk perencanaan daerahnya. Jawa Timur menyadari pentingnya kependudukan, untuk itu mulai dirintis sekolah siaga kependudukan. Sementara baru ada 7 sekolah siaga kependudukan yang tersebar di Malang, Sidoharjo dan Surabaya. Permasalahan pernikahan dini masih banyak terjadi di 3 kabupaten yaitu Bondowoso, Malang dan Madura.

- **Kasie tugas pembantuan Dinas Pendidikan**

Informan belum paham dengan bonus demografi. Sesuai tupoksinya dinas pendidikan mengurus sekolah menengah dan kejuruan. Di Jawa Timur diberlakukan sekolah *double track*. Dinas pendidikan bekerjasama BKKBN provinsi menggarap sekolah siaga kependudukan dan 10.000 taman posyandu yang diintegrasikan dengan BKB dan PAUD.

Gambar 4.3 Kondisi Pendidikan di Jawa Timur 2017

Dinas Pendidikan Prov. Jatim						KARAWANG/BOJA				
KONDISI PENDIDIKAN						APM	APK	APS		
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017						98,57	107,56	0,09		
No.	Komponen	Satuan	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	61,23	71,05	0,95		
1.	APM	%	98,72	88,65	68,65	39,50	59,92	1,12		
2.	APK	%	112,93	103,95	82,80	58,48	74,30	1,04		
3.	Angka Transisi	%		99,05	90,03	51,47	65,91	0,85		
4.	Angka Putus Sekolah	%	0,07	0,29	0,54					
5.	Angka Mengulang	%	1,13	0,07	0,09					
6.	Angka Lulusan	%	99,97	99,23	98,68					
7.	Rasio Siswa : Kelas	siswa/kelas	24	26	31					
8.	Rasio Ruang Belajar : Kelas	ruang/kelas	1,26	0,87	1,05					
9.	Rasio Siswa : Guru	siswa/guru	14	12	13					
10.	Rasio Siswa : Sekolah	siswa/sklh	151	221	288					
11.	Rata-rata Lama Sekolah*)	tahun	7,23							
12.	Rasio siswa SMA : SMK	%	41,91 : 58,09							
NASIONAL			SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA			
	APM	94,88	APM	81,11	APM	65,86				
	APK	105,06	APK	103,66	APK	83,87				
No	PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS	TARGET-SASARAN								
	1	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)	52.690 siswa (22.810 SMA; 29.880 SMK)							
	2	Pengembangan SMAN Taruna Nala	Sarana dan Prasarana, Perluasan Lahan, Pembangunan Kolam renang Kurikulum Pembelajaran.							
	3	Pengembangan SMAN 3 Taruna Angkasa	Penerimaan 200 peserta didik Sarana dan Prasarana, Rehab Asrama, Pengadaan Alat Drumband Kurikulum Pembelajaran							
	4	SMA Double Track	95 lembaga (54 SMA di beberapa Kabkota; 21 SMA di Madura; 20 MA di Madura) 10.000 Siswa							
5	USBN - BK	100 %								

- Kabid Sosbud Bappeda



Informan sudah memahami dan menyajikan materi bonus demografi. Bappeda bekerjasama dengan Bapak Lutfi (Koalisi Kependudukan Jatim) membahas dan merumuskan kebijakan-kebijakan terkait penyiapan

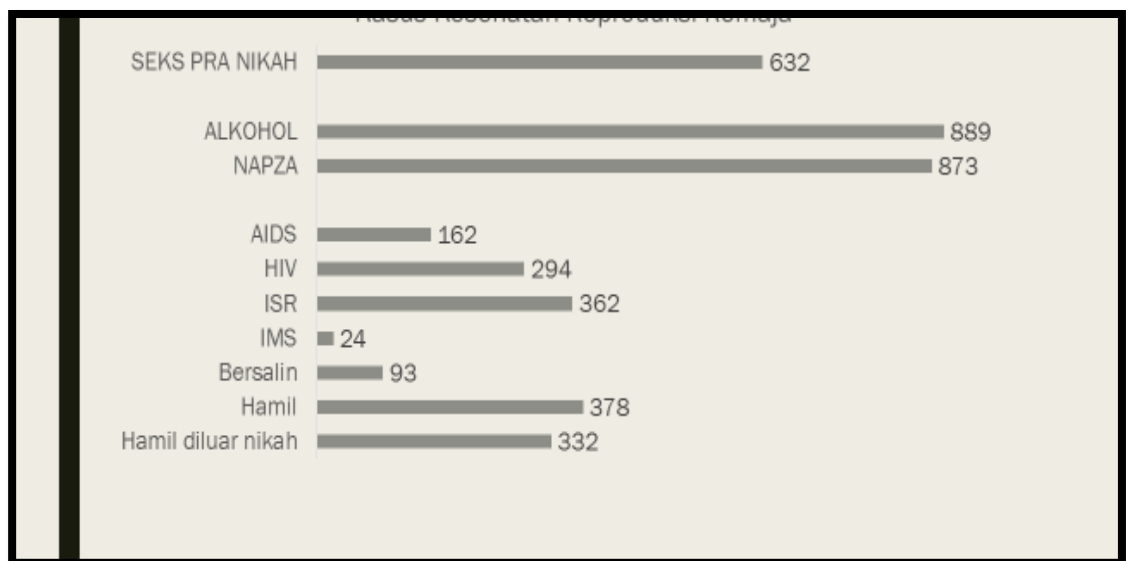
bonus demografi. Memang masalah kependudukan di Jawa Timur sangat kompleks, dari masih rendahnya IPM dibawah angka nasional. IPM Jatim jatuh di sebabkan masih rendahnya bidang pendidikan. Secara spesifik di Madura sebagian besar sekolah berupa pondok pesantren. Masyarakat lebih memilih mondok

dibandingkan harus bersekolah formal, sehingga penduduknya bukanya tidak bisa baca dan tulis. Mereka bisa baca dan tulis namun tidak mempunyai ijazah formal.

- **Dinas Kesehatan**

Saat wawancara di dinas kesehatan tidak bisa bertemu dengan informan yang diinginkan yaitu kepala dinas. Tim hanya ketemu dengan staf yang ada di bidang kesehatan remaja. Sehingga data yang diperoleh dapat dilihat di gambar 4.4.

Gambar 4.4 Kasus Kesehatan Reproduksi di Provinsi Jawa Timur



Tampak pada gambar 4.4 menunjukkan kasus kesehatan reproduksi remaja kebanyakan minum-minuman beralkohol dan napza. Kasus lain yang mengkhawatirkan yaitu seks pra nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan.

- **Kasie Dinas tenaga kerja**
Informan pernah mendapatkan sosialisasi bonus demografi. Upaya dinas tenaga kerja Provinsi Jawa Timur salah satunya membuka kesempatan magang kerja dengan program Jatim ProMag.



Gambar 4.5 Capaian Penyerapan Tenaga Kerja melalui sektor nakertrans, 2016-2017

CAPAIAN PENYERAPAN TENAGA KERJA MELALUI SEKTOR NAKERTRANS TAHUN 2016-2017					
CAPAIAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 9/D SEMESTER IV (JANUARI-DESEMBER 2017)					
NO	JENIS PENEMPATAN	Tahun 2016	Persentase	Tahun 2017	Persentase
1	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Kab/Kota	2.752	0,68	5.536	1,20
2	Antar Kerja Lokal (AKL)	299.173	73,52	366.488	79,90
a	Antar Kerja Lokal (AKL) Kab/Kota	191.371		193.264	
b	Antar Kerja Khusus (AKSLUS)	454		929	
c	Bursa Kerja di Provinsi (Bulanan dan JMP)	1.377		10.561	
d	Lembaga Penempatan Tenaga Swasta (LPTKS)	909		859	
e	Bursa Kerja Khusus (BKK) di DPT Prov/SMA/PT	31.327		66.343	
	1) Bursa Kerja Khusus (BKK) DPT-PA	5.271		11.599	
	2) Bursa Kerja Khusus (BKK) SMA	15.877		43.553	
	3) Bursa Kerja Khusus (BKK) PT/Universitas	10.179		11.191	
f	Penempatan pemagangan tenaga kerja dlm negeri	1.663		1.829	
g	Perluasan kesempatan kerja sektor informal	46.936		61.550	
	1) Binaan Provinsi	8.453		3.882	
	2) Binaan Kab/kota	38.486		57.668	
h	Penempatan melalui LPKS di 38 kab/kota	25.145		31.133	
3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	56.843	13,97	63.490	13,88
a	PPTKS Embarkasi Bandara Juanda	11.823		33.706	
b	Cab PPTKS Embarkasi Bandara Juanda	4.615		10.932	
c	Embarkasi non Juanda	18.099		18.860	
d	Penempatan pemagangan TK luar negeri	309		434	
4	Penempatan Sebagai Tenaga Kerja Kontrak/PPJP	48.113	11,82	23.960	5,20
	JUMLAH	406.681		459.916	

Peningkatan capaian penyerapan tenaga kerja melalui sektor ketenagakerjaan pada tahun 2016 = 406.681 orang dan tahun 2017 = 459.916 orang (Naik 11,53%). Target penyerapan tenaga kerja tahun 2017 sebanyak 370.000 orang (tercapai 124,30%).

- **Kasie perencana dinas koperasi**
Informan belum mengetahui bonus demografi. Pengetahuan hanya terkait ruang lingkup pekerjaan sehari-hari di dinas koperasi.

Gambar 4.6 Perkembangan Koperasi di Jawa Timur, 2016-2017

PERKEMBANGAN KERAGAAN KOPERASI DI PROVINSI JAWA TIMUR POSISI : JUNI 2017					NO	JENIS	AKTIF (UNIT)	TIDAK AKTIF (UNIT)
NO	URAIAN	JUNI 2016	JUNI 2017	% PERKEMBA NGAN			3	4
					1	KUD Pangan	645	58
					3	Kop Pertanian	767	533
					6	Kop Kehutanan	487	43
					10	Kopontren	1.088	347
					11	Kopinkra	95	78
					12	KPRI	2.721	111
					13	Kopkar	1.804	403
					19	Kop Wredatama	207	42
					20	KSP	1.499	72
					21	KJKS	243	17
					22	Kopgas	191	118
					27	Kopwan	9.284	50
					28	Kop Angkutan Darat	29	39
					30	Kop Profesi	107	18
					32	Kop Mahasiswa	72	43
					33	Kop Pemuda	53	30
					37	KSU	4.410	557
					38	Kop Lainnya **)	2.170	910
						Sub Jumlah	26.815	3.637
					39	Kop Sekunder	107	21
						Jumlah	26.922	3.658
1	Total Koperasi	31,200	31,371	0.55				
	a. Koperasi Aktif	27,490	27,656	0.60				
	b. Koperasi Tdk Aktif	3,710	3,715	0.13				
2	Anggota	7,623,110	7,667,265	0.58				
3	RAT	10,448	13,195	26.29				
4	Manager	5,235	5,367	2.52				
5	Karyawan	53,898	59,701	10.77				

JUMLAH UMKM DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT SEKTOR DAN KABUPATEN/KOTA												
NO	KODE	KABUPATEN/ KOTA	SEKTOR/LAPANGAN USAHA									JUMLAH
			PERTANIAN	PERTAMBANG- ANG DAN PENGALIAAN	INDUSTRI PENGOLAHAN	LISTRIK, GAS DAN AIR	KONSTRUKSI	PERDAGANG- AN HOTEL DAN RESTORAN	TRANSPOR- TASI	KEUANGAN	JASA-JASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		JAWA TIMUR	4,112,443	26,680	356,047	12	16,788	1,720,042	174,541	8,035	411,342	6,825,931

- **Dinas perindustrian**

Saat melakukan wawancara di dinas perindustrian kebetulan informan sedang ada kegiatan di luar kantor sehingga didisposisikan keajarannya. Secara umum dinas perindustrian belum mengetahui isu bonus demografi. Dinas perindustrian di provinsi salah satunya perannya pembinaan IKM menengah keatas. IKM mendapatkan pendampingan dan fasilitasi untuk pengurusan legalitas usahanya. IKM juga mendapat pelatihan, pendampingan kualitas produk dan promosi perdagangan. Pertumbuhan IKM di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren positif.

- **Koalisi kependudukan Jatim**

Informan berpendapat bahwa bonus demografi bukan hal baru bagi pemerintah daerah Jawa timur. Bappeda dan gubernur sudah paham dan peduli dengan bonus demografi. Untuk tingkat provinsi sudah bisa menikmati bonus demografi, namun di tingkat kabupaten/kota belum tentu.

Upaya informan untuk mensosialisasikan bonus demografi sudah sering dilakukan. Saat ini, sedang menggiatkan kabupaten/kota agar menyusun dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang melibatkan 5 dimensi.

b. Wawancara di tingkat Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang termasuk kawasan yang tertinggal diantara cluster agropolitan madura. Berikut hasil wawancara di instansi pemerintah daerah :

- **Kepala Dinas Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak**

bonus demografi sudah diketahui oleh OPD Kb di Kabupaten Sampang. Namun menjelaskan lebih detail tentang definisi bonus demografi beberapa informan kesulitan. Terkait dokumen Grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) pihaknya belum menyusun. Tahun lalu sebenarnya sudah ada inisiatif pegawainya untuk menyusun, namun terhenti disebabkan orang tersebut dimutasi ke tempat lain. Sekarang stafnya tidak ada yang paham dan mengerti penghitungan indikator yang ada di GDPK. Sehingga perlu pelatihan dan pendampingan dari BKKBN Perwakilan.

Informan yang menangani pengendalian penduduk pernah mendapatkan informasi bonus demografi tapi belum paham kedalam bonus tersebut. Program pengendalian penduduk yang mengurus GDPK selama ini g sempat belajar dan inisiatif menyusun sebab sejak dana BOK KB yang didrop dari pusat sangat banyak sehingga kuwalahan menyerapnya.

- **Kepala Bappeda**



Informan sebagai kepala dinas merasa sudah pernah mendengar bonus demografi. Pemahaman bonus demografi masih terbatas. Di Kabupaten Sampang sepertinya masih jauh untuk mendapatkan

bonus demografi. Kualitas sumber daya manusia masih rendah berdasarkan IPMnya. Hambatan pemerintah untuk meningkatkan IPM salah satunya bidang pendidikan. Masyarakat disini kesadaran untuk bersekolah formal masih kurang. Kebanyakan anak-anak dan orang tuanya memasukan anaknya ke pondok pesantren dan putus sekolah tidak melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Pernah pemerintah daerah membuat program pendidikan paket A, B dan C dengan hadiah bagi yang lulus. Namun peminatnya juga masih rendah.

Selain itu, kultur budaya kawin muda dan kawin-percerai dimasyarakat. Masyarakat belum sadar betul tentang pendewasaan perkawinan dan dampak bagi keluarga. Banyak kejadian perkawinan muda berakhir perceraian. Ada juga perkawinan tidak serumah, suami atau istri setelah menikah berpisah untuk menjadi TKW atau TKI. Di sebagian wilayah banyak rumah-rumah bagus namun tidak berpenghuni, hal ini disebabkan pemiliknya merantau dan hasilnya dibawa pulang membangun rumahnya.

Masalah lainnya, ada daerah yang belum mendapatkan fasilitas listrik. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat membangun rumah jauh dari pemukiman penduduk dan jauh terpencil. Kabupaten Sampang sulit berkembang juga, hal ini disebabkan investor besar tidak banyak yang mau berinvestasi di daerahnya. Masyarakat juga

secara tidak langsung tidak menginginkan ada perusahaan besar berdiri di wilayahnya. Mereka khawatir akan dampak negative jika wilayahnya tumbuh pesat. Ada kesenjangan antara penduduk local dengan penduduk pendatang.

- **Dinas Kesehatan**

Tim peneliti kesulitan memperoleh informasi ke kepala dinas maupun kbid-kbidnya, hal ini disebabkan ada kegiatan pelayanan dilapangan. Sehingga ruang hanya ada stafnya. Informasi yang didapat hanya data kematian bayi berjumlah 67 kematian dan 9 kematian ibu.

Upaya kesehatan reproduksi remaja diantaranya pemberian tablet penambah darah bagi anak sekolah, buku saku remaja (bagi remaja peduli kesehatan), bekerjasama dengan kementerian agama berupa materi/bimbingan terkait kespro, persiapan pra nikah, persiapan kehamilan (bagi remaja yang mau nikah).

- **Dinas Pendidikan**

Kabid guru dan tenaga kependidikan belum mengetahui tentang bonus demografi. IPM di Jatim dan kabupaten Sampang kurang optimal disebabkan masih banyak yang berpendidikan rendah. Sekitar 70 persen penduduk usia 45 th keatas berpendidikan rendah (tidak tamat SD). Kondisi ini disebabkan selain motivasi sekolah formal yang ada ijazahnya masih rendah, mereka lebih suka anaknya disekolahkan di pondak pesantren. Selain itu, 14 kecamatan rata-rata kekurangan guru meskipun sudah dibantu guru tidak tetap (GTT).

- **Dinas Perindustrian**

Informan belum mengetahui isu bonus demografi. Ruang lingkup dinas perindustrian fokus pada pembinaan IKM dan membantu menciptakan dan mengikuti even pameran dan pemasaran. Di kabupaten Sampang, home industri banyak tumbuh di 14 kecamatan seperti industri genteng, krupuk ikan, pengasapan ikan dan petis. Dinas perindustrian setiap pelatihan mengandeng karang taruna.

- **Dinas koperasi dan UMKM**

Pengetahuan bonus demografi belum terpapar. Kegiatan dinas koperasi dan UMKM melakukan pembinaan koperasi yang ada untuk pengembangan dan legalitas koperasi. Ijin usaha mikro dikeluarkan oleh camat.

- **DPRD komisi 4**

Saat berkunjung ke komisi 4 ditemui oleh salah satu anggota dewan. Hal ini disebabkan di kantor dewan sedang ada kegiatan lain bersama pemerintah daerah. Terkait bonus demografi, anggota dewan yang terhormat belum mengetahui secara umum definisi bonus demografi. Persepsi selama ini, pihak BKKBN hanya mengurus KB saja. Program kependudukan cakupannya tidak hanya mengatur kelahiran, tetapi lebih luas seperti kematian dan migrasi.

Permasalahan yang ada di Sampang diantaranya banyak penduduknya menjadi TKI ilegal, pertanian yang bergantung musim sedangkan kalau kemarau tanahnya kering kerontang. Kalaupun ada irigari jumlahnya sedikit yang mampu diairi. Bendungan Lempa yang sedang dibangun untuk menampung air hujan semoga dapat

meningkatkan produktivitas pertanian nantinya. Informan sementara berpendapat bahwa pencegahan kehamilan itu hukumnya haram, meskipun pengaturan kelahiran itu penting.

4.2 Peserta FGD di Kab. Sampang

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Jumlah Anak	Pekerjaan	Pemakaian kontrasepsi
1	Siti Fatima	42	S1	2	swasta	tidak pakai
2	Hasniyah	44	SMP	3	swasta	Implan
3	Harromah	41	SMP	4	swasta	Implan
4	Mairuzah	44	S1	3	swasta	Implan
5	Nur hayati	32	SMA	3	swasta	IUD
6	Rusmiyati	41	S1	2	swasta	IUD

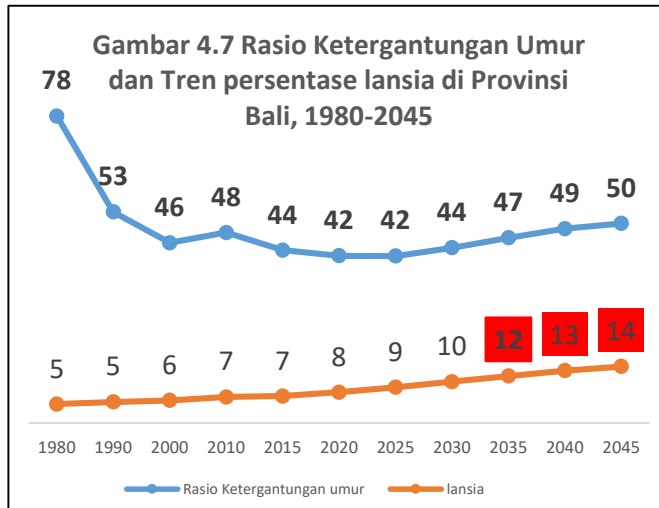
Berikut hasil FGD yang pesertanya remaja dan wanita usia subur (WUS). Peserta FGD wus menyebutkan rata-rata wanita menikah umur 17-23 tahun. Di masyarakat sampang terdapat budaya menerima lamaran dan pantang



menolak. Meskipun dalam perjalanannya bisa dibatalkan. Perkawinan yang tidak menghasilkan anak terus cerai barang yang berasal dari laki-lakinya saat nikah/nlamar dapat diambil lagi. Terkait jumlah anak peserta FGD banyak yang menginginkan anak banyak (4

anak laki dan cewek). Peserta FGD banyak yang menggunakan pil dan suntik, ada pula yang MOW.

4.3. Provinsi Bali



Menggunakan data yang sama, dibuat tren rasio ketergantungan umur di Provinsi Bali. Diketahui posisi terendah berada pada 42 persen di tahun 2020-2025.

Hasil informasi yang dihasilkan pengumpulan data lapangan diantaranya :

1. PSKK Universitas Udayana

Informan menyatakan bahwa provinsi Bali sejak tahun 2005 sudah masuk bonus demografi dengan lansia diperkirakan kedepan sekitar 14 persen. Terdapat 2 kabupaten yang maju diantara kabupaten lain yaitu kabupaten Badung dan kota Denpasar. Kedua wilayah tersebut angka migrasinya tinggi. Pak walikota sangat perhatian dengan masalah kependudukan. Upaya pemanfaatan bonus demografi dengan menggerakkan entrepreneurship.

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah yaitu :

- Mensinkronkan antara birokrasi dengan swasta maupun masyarakat dan akademisi.
- Cara pandang kabupaten/kota terhadap isu kependudukan masih berbeda-beda.
- Desa ditempatkan sebagai garda terdepan persoalan kependudukan kedepan dengan dukungan dana desa.

- Lansia yang meningkat perlu model strategis mengelola dan mencetak lansia yang produktif, semisal pengembangan pekerjaan berdasarkan hobi (ternak dan berkebun).

2. Bappeda

Bonus demografi sudah dipahami dengan baik. Isu bonus demografi sudah masuk dalam RPJMD. Transisi demografi mencetak bonus demografi bisa sebagai peluang dan tantangan. Bappeda memandang pengangguran masih menjadi persoalan meskipun angkanya Provinsi Bali paling kecil persentase penganggurannya. Dulu pengangguran berpendidikan rendah namun sekarang pengangguran menumpuk di lulusan perguruan tinggi.

Bappeda berupaya meningkatkan produktivitas lulusan SMK dengan merevitalisasi SMK sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada. Program prioritas pemerintah daerah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing untuk itu bekerja sama dengan beberapa negara untuk melaksanakan kegiatan magang kerja keluar negeri, setelah selesai magang kerja bisa kembali ke Bali untuk membangun Bali. Kemudian membangun development skill center di Denpasar.

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Bali diantaranya akan membangun kereta api yang menghubungkan antar kabupaten di Bali, membangun bandara udara di daerah Bali bagian utara dan pembangunan kresna land yang berada di Singaraja sebagai tempat bermain di malam hari. Bali menghadapi era 4.0 dengan lebih kreatif dalam menciptakan lapangan kerja. Sekaitan dengan program lansia, di kabupaten Singaraja ada sejenis tempat untuk lansia (hunian ramah lansia).

3. Dinas Koperasi

Informan belum pernah dengar istilah bonus demografi.

Adanya upaya peningkatan UKM untuk berkontribusi PDRB. Di Bali terdapat 4.832 koperasi.

4. Dinas kesehatan

Ada dorongan dari masyarakat adanya KB Bali yaitu setiap keluarga mempunyai anak 4 tapi berkualitas. Ada kekhawatiran kehilangan adat Bali terutama pemberian nama anak yaitu : Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut.

5. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB

Dokumen GDPK sudah ada, namun belum selesai dibukukan masih tahap finalisasi. Sedikit informasi yang diperoleh terkait penelitian disebabkan keterbatasan waktu informan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tenaga kerja dan pengangguran provinsi Bali berada diposisi terendah di Indonesia. Dinas kependudukan baru 2 tahun dibentuk di provinsi Bali. Data dukcapil sudah mencakup seluruh penduduk. **Informan menyatakan tidak ada pembatasan jumlah anak dalam pelayanan. Slogan 2 anak cukup sekarang diubah keluarga berkualitas, berapapun anaknya yang penting mampu.** Di Undang-undang tidak ada yang menyebutkan jumlah anak hanya 2. Sekarang yang penting keluarga berkualitas.

6. BKKBN Perwakilan Prov. Bali

Informan berpendapat sudah pernah dan memahami bonus demografi. TFR sudah rendah disekitar 2,1. Tugas BKKBN untuk menjaga dan merawat supaya tidak naik. Sasaran program untuk melihat pergerakan unmet need yang meningkat. Sementara di Bali ada

signyal dihidupkannya KB Bali yaitu jumlah anak 4. Kabupaten Badung lebih gencar dengan melakukan FGD dengan mengundang BKKBN perwakilan untuk mengkampanyekan KB Bali. Selain itu, ada tuntutan agar BKKBN memberikan bantuan keluarga yang infertil. Secara budaya Bali menganut patrilineal, perlu materi-materi promosi kespro yang mudah dipahami yang lebih sederhana.

Bonus demografi yang sudah dinikmati dapat dilihat diantaranya Indeks kebahagiaan Bali ranking 2 secara nasional, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sejak Bali memasuki transisi bonus demografi. Di Kabupaten Badung pemerintah daerah memberikan sekolah gratis sampai SMA, biaya rawat inap, biaya penunggu yang sakit, siswa SMP/SMA dikasih laptop gratis.

Wawancara di tingkat Kabupaten Karangasem

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

Informan sudah pernah mendengar tentang bonus demografi. Untuk mendukung peningkatan SDM ditingkat SMP ada program kartu Karangasem cerdas sejak tahun 2017.

Kendala yang dihadapi dikpora terkait tenaga pengajar yang kurang (terutama SD). Tahun 2017 tidak ada rekrutmen lowongan guru. Infrastruktur banyak yang rusak terutama didaerah gempa bulan september lalu.

- Bappeda

Informan berpendapat bonus demografi sudah disosialisasikan. Visi dan misi bupati terkait penanggulangan kemiskinan, nawasatya dan peningkatan pertanian.

- **Dinkes**

Informan menjelaskan bahwa kebijakan sasaran dinkes merujuk kebijakan pusat yaitu Stunting, TBC dan imunisasi balita. Terkait KB pasca salin termasuk berhasil di kabupaten Karangasem. Masalah kespro diantaranya masih ada anak dibawah 16 tahun yang hamil, Aids masih tinggi salah satunya dampak efek samping bekerja (giude dipantai kuta). Masih ditemui penduduk yang tidak mempunyai KTP dan KK melahirkan dengan kondisi miskin.

- **DPRD**

Anggota DPRD Kabupaten Karangasem **belum memahami bonus demografi**. Menyadari kalau IPM di wilayahnya terendah diantara kabupaten/kota di Bali. Hal ini disebabkan masih ada penduduknya yang buta aksara. Pendapatan asli daerah masih terbatas. Pendapatan pemerintah daerah lebih banyak dari hasil bahan galian golongan C dan pariwisata dari obyek gunung Agung.

- **Dinas pengendalian penduduk dan KB**

Informan sudah memperoleh informasi bonus demografi. Secara kelembagaan tahun 2016 dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah dibentuk.

FGD dilakukan bersama wanita usia subur dilakukan di ruang pertemuan kantor Dinas PP dan Kb Kabupaten Karangasem. Kegiatan FGD bersama remaja di kantor Dinas PP dan KB kabupaten Karang asem. Berikut peserta FGD dan karakteristiknya.

Tabel 4.3 Peserta FGD di Kab. Karangasem

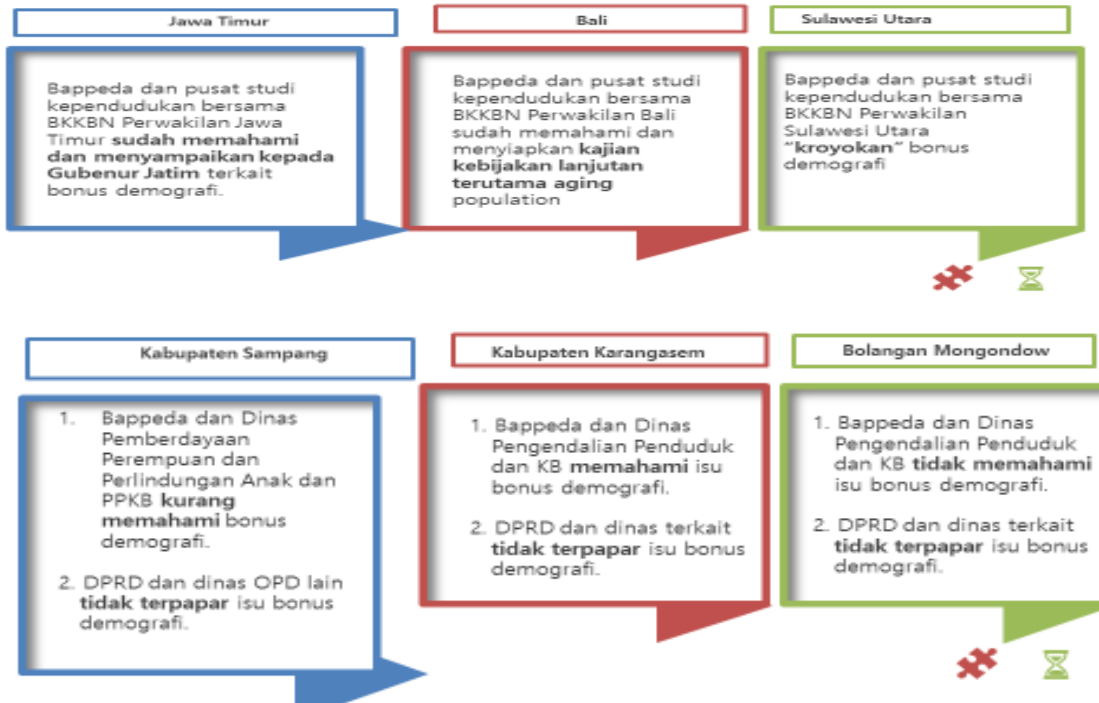
Nama	Jml saudara	Pekerjaan orang tua	Pendidikan	Umur
Ni. Kadek	3	Guru/pedagang	SMA	23
Ni. NYoman	4	Pedang/pedagang	SMA	25
Silvia	3	Nelayan/rumah tangga	SMA	25
Anisa	4	Nelayan/rumah tangga	SMA	25

Tujuan kuliah ingin menambah ilmu, ibunya hebat sebab bisa melahirkan 4 anak. Ingin seperti gurunya. Kuliah S1 tidak ingin diploma sebab nanggung. Orang tua ibunya nikah 19 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 19 tahun. Laki-laki pada umumnya nikah diatas 26, 20 tahun. Keinginan punya anak 2-4 anak. Rata-rata 2 anak saja sedangkn yang ingin 4 anak agar urutan anak ketut tidak hilang. Tergantung suami dan mertua untuk menentukan anak.

Cari suami yang berusia diatas atau setara umurnya. Akes internet. Pekat data inernet mingguan. Orang tua membelikan Handphone sejak SMP kelas 2-3. Lowongan kerja diperoleh melalui internet dan papan pengumuman. Takut dikibulin cari kerja di internet. Kespro dengan HIV Aids diperoleh di sekolah dibangku SMP. Adanya penyuluhan di sekolah.

Jenis pekerjaan yang diinginkan diantaranya dokter, guru dan pegawai kantor. Tidak ingin jadi nelaya sebab ingin memperbaiki kualitas kehidupan.

Hasil wawancara : Pemahaman dampak TFR rendah terkait Bonus demografi di tingkat Provinsi



BAB V

Analisis SWOT

5.1 . Analisis SWOT Provinsi Sulawesi Utara

a. Kekuatan

- RPJMD 2016-2012 sudah menyebutkan adanya informasi bahwa sejak tahun 2014 Provinsi Sulawesi Utara sudah menikmati window opportunity dengan puncaknya di tahun 2030.
- 4 kabupaten/kota yang sudah menyusun dokumen Grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) dan disosialisasikan bonus demografi.
- informan berpendapat Sulut sedang berjalan transisi demografisnya. Dampak bonus demografinya belum dirasakan oleh pemerintah daerah.
- Pandangan masyarakat jumlah anak ideal 2 sudah menjadi *life style*.
- Kualitas SDM diukur IPM menunjukkan diatas angka nasional.

b. Kelemahan

- Dokumen RPJMD provinsi belum mengaitkan bonus demografi sebagai bagian keberhasilan program KB (penurunan fertilitas) yang perlu dipertahankan di angka 2,1.
- Bappeda kabupaten belum paham dan menguasai bonus demografi.
- Akademisi belum mengetahui adanya transisi demografi lanjut (bonus demografi menutup).
- Angka pengangguran tinggi dan sektor industri yang menyerap tenaga kerja banyak belum memadai.
- Otonomi daerah mengakibatkan regulasi perputaran pegawai yang tinggi menyebabkan kekurangan tenaga teknis kependudukan.

c. Peluang

- Di kabupaten Bolaang Mongondow dinas pengendalian penduduk dan KB berdiri sendiri (utuh).
- Pusat Studi kependudukan FISIPOL Universitas Sam Ratulangi sudah memfasilitasi penyusunan dokumen GDPK dan sosialisasi bonus demografi.
- Kesadaran lulusan SMK/SMA untuk mencari kerja disektor perdagangan dan pertokoan relatif banyak.
- Akses dan infratraktur sedang dibangun untuk menarik investor luar menanamkan dan mendirikan perusahaan industri yang menyerap tenaga kerja.

d. Ancaman

- Di kabupaten pemekaran merasa daerahnya kurang penduduk. sehingga program pengendalian penduduk dan KB belum menjadi program prioritas.
- Bonus demografi hanya sebagai retorika dipertemuan-pertemuan saja.
- Perkawinan dini masih banyak terjadi terutama di perdesaan.
- Migrasi dari kabupaten ke kota perdagangan.
- Kabupaten Bolmong berdiri perusahaan asing proyek kontrak karya pusat yang minim menyerap tenaga kerja lokal, justru banyak tenaga kasar dari China.

5.2. Analisis SWOT Provinsi Jawa Timur

a. Kekuatan

- Pemerintah daerah terutama gubernur sudah menyadari dan terpapar bonus demografi.
- Tren kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur menurun dan berada dibawah angka nasional.
- Bappeda dan koalisis kependudukan selalu memberikan masukan ke gubernur terkait upaya pemanfaatan bonus demografi.
- Sebagian OPD KB telah menyusun GDPK sebanyak 17 dari 38 kabupaten/kota.

b. Kelemahan

- Di tingkat kabupaten/kota belum terpapar isu bonus demografi.
- IPM sebagian kabupaten/kota masih rendah.
- Disparitas pembangunan SDM antar kabupaten/kota.
- Belum ada sinergitas antar dinas untuk memanfaatkan bonus demografi.
- IKM dan UKM belum dimaksimalkan untuk penyerapan tenaga kerja.

c. Peluang

- Ada kebijakan pemerintah daerah untuk percepatan membangun infrastruktur dan pertumbuhan investasi maupun industrialisasi.
- Pondok pesantren sebagian bertransformasi menjadi lembaga pendidikan formal.
- Mulai bermunculan sekolah vokasi di kabupaten/kota.
- Pemerintah daerah berupaya memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan kuantitas pendidikan.

d. Ancaman

- Kabupaten Sampang belum membuka kesempatan industry besar untuk masuk ke wilayahnya.
- Masih banyak perkawinan dini yang berakhir perceraian.
- Masih ada angkatan kerja yang pilih-pilih kerjaan padahal pendidikannya rendah dan juga lulusan SMK yang tidak mau bekerja dibidangnya karena tidak suka dengan jurusnya.
- Terdapat koperasi yang dibubarkan karena tidak aktif lagi.
- Putus sekolah dan menganggur dirumah, tidak mau keluar daerah untuk mengadu nasib ke perkotaan atau bekerja pertanian.

5.3. Analisis SWOT Provinsi Bali



BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

1. Bonus demografi secara istilah masih dianggap hal baru yang dan belum dipahami secara benar oleh pemerintah daerah. Keberadaan puncak bonus demografi masih merujuk tahun nasional yaitu tahun 2030. Padahal beberapa provinsi sudah berada pada peluang bonus demografi dan secara bertahap menuju *Aging Population* dan bonus demografi menutup.
2. Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan 5 pilar belum diselesaikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga signal peringatan dini kependudukan terkait bonus demografi tidak berfungsi dengan baik.
3. Pemerintah daerah dan masyarakat belum siap memanfaatkan peluang bonus demografi yang sedang berjalan di wilayahnya.

6.2. Rekomendasi

1. BKKBN perwakilan perlu memperbaiki pemahaman bonus demografi bagi OPD baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota terutama dalam dokumen RPJMD. Selain itu, perlu sosialisasi bahwa bonus demografi perlu memperhatikan angka fertilitas agar tetap rendah (TFR sekitar 2,1).
2. BKKBN perwakilan perlu memanfaatkan pendataan keluarga untuk memetakan kabupaten/kota yang mempunyai keluarga yang berisiko pengangguran dan kemiskinan.

3. PLKB perlu dibekali tentang pengertian dan pemahaman bonus demografi untuk disampaikan ke masyarakat agar penduduk produktif dapat aktif masuk pasar kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih.(2018) Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini. Depok:Rajawali pers
- BPS. (2013). Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPS.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. Population Matters Monograph MR-1274, RAND, Santa Monica
- Bongaarts J. 2009 Human population growth and the demographic transition. Phil. Trans. R. Soc. B 364, 2985– 2990. (doi:10.1098/rstb.2009.0137)
- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin dan Sri Rum Giyarsih. 2015. “Fertilitas dan Migrasi: Kebijakan Kependudukan Untuk Migrasi di Kabupaten Sleman”. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 No 1.
- Noor, Munawar. 2015. Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi. Vol 4, No 1. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.
- Zulham, T dan Basyiran, B .2015. Bonus Demografi Di Kota Banda Aceh: Peluang Dan Tantangan Ketenagakerjaan
- Rimbawan, Nyoman Dayuh, 2014. Bali Diproyeksikan Mengalami Bonus Demografi Puncak 2020-2030: Peluang atau Bencana. Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Vol. X No. 1 : 37 – 44, ISSN : 1907-3275, Bali.
- Meita Nike Harmanto, Agnes Tuti Rumiati, Kresnayana Yahya.2016.* Analisis Pengelompokan Mengenai Perubahan Struktur Kependudukan Dalam Menghadapi Era Bonus Demografi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.Vo.5. No (2).2016. http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/1762